

DAFTAR PUSTAKA

- Mashun, Mohammad. 2016. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ritonga, Irvan Taufiq. 2009. *Perencanaan dan penganggaran keuangan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sancoko, Bambang, Djang Tjik A. S, Noor Cholis Madjid, Sumini, dan Hery Triatmoko. 2008. *Kajian Terhadap Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja di Indonesia*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Anggarini, Yunita dan Ahmad Puranto. 2010. *Anggaran Berbasis Kinerja*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Abdul Halim. 2007. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Hindri, Asmoko. 2006. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas pengendalian keuangan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* Vol. 2 No.2.
- Nordiawan, Dedi. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kadir dan Triwahyuni. 2013. *Pengenalan Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Rasul, Syahrudin, 2003. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: PNRI.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sudaryono. 2017. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lukman, Mediya. 2013. *Badan Layanan Umum Daerah Dari Korporasi Menuju Birokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Priyatno, Duwi. 2012. *Cara Kilat belajar Analisis Data dengan SPSS 20*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Wulandary, Ovy Farida. 2018. " Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah". *E-Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta*.

- Nugroho, Alifianto.2017. “Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah”. *E-Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Syahroni, Khoirul Habib.2014. “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kesesuaian Tugas - Teknologi Informasi, Dan Kepercayaan Atas Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Individual”. *E-Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Anggita, Wenny.2017. ” Pengaruh Analisis Standar Belanja, Standar Pelayanan Minimal dan Indikator Kinerja terhadap Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja”. *Ejurnal Akuntansi Universitas Bangka Belitung*.
- Sutrisno.2010. “Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Informasi Teknologi Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip). *E-Jurnal UIN Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Fitriani, Riska. 2014. “Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi, Keahlian Pemakai Dan Intensitas Pemakaian Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi”. *E-jurnal Universitas Bengkulu*.
- Sri Endrayani Komang, Adiputra I Made Pradana, Darmawan Surya Ari Norman.2014. ”Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI (Volume 2 No. 1 Tahun 2014)*.
- Nurlaili, Anis. 2016. “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah”. *E-Jurnal Universitas Jember*.
- Rezeqiah, Ana Muchlisa. 2017. “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”. *E-Jurnal Universitas Muhammadiyah Palembang*.
- Safarudin dan Sutriana Basri. 2016. “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Instansi Pemerintah”.
- Indah Puji Lestari. 2014. “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja”.

Permenpan 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Keputusan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800-35 Tahun 2006 Tentang Penetapan Peringkat Dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2014.

_____ Nomor 120 – 10421 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peringkat Dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2015.

_____ Nomor 100 - 53 Tahun 2018 Tentang Penetapan Peringkat Dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional.

Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

_____ Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

_____ Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

_____ Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM.

Peraturan Pemerintah Pasal 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Informasi Pusat Tahun 2015.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang Tahun 2016.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang Tahun 2017.

Modul Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (*Pusdiklatwas BPK,2007:10*).

<https://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/id/membuat-masalah-masyarakat-menjadi-masalah-pemerintah-refleksi-seorang-mantan-bupati-di-indonesia>. Diakses pada 26 april 2019.

www.bpkp.go.id. Diakses 28 april 2019.

http://perencanaan.ipdn.ac.id/kajian-kajian_perencanaan/penganggaranberbasis-kinerja. Diakses 28 april 2019.

<https://ikadekariyasa.wordpress.com/2013/06/07/pengertian-anggaran-berbasis-kinerja/>. Diakses 28 April 2019.

<https://www.kompasiana.com/adesuerani/55000a4ea33311a96f50fa16/sejarah-desentralisasi-di-indonesia-selesai>. Diakses 1 Mei 2019.

https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah . Diakses 1 Mei 2019.

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2015/02/tujuan-otonomi-daerah-dan-manfaatnya>. Html. Diakses 1 Mei 2019.

<https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia>. Diakses 1 Mei 2019.

<http://nadirkarya.blogspot.com/2012/02/pentingnya-good-governance-dalam-sebuah.html>. Diakses 02 Mei 2019.

<http://perencanaan.ipdn.ac.id/kajian-perencanaan/kajian-perencanaan/akuntabilitaskinerjainstansipemerintah>. Diakses 2 Mei 2019.

<https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/4516>. Diakses 3 Mei 2019.

<http://theorykeuangaerah.blogspot.com/2015/12/anggaran-berbasis-kinerja.html>. Diakses 27 Mei 2019.

<http://perencanaan.ipdn.ac.id/kajian-perencanaan/kajian-perencanaan/akuntabilitaskinerjainstansipemerintah>. Diakses 27 Mei 2019.